LAPORAN KEGIATAN

NARASUMBER PADA ACARA
KONSINYEERING DENGAN TOPIK "PERANAN KAWASAN INDUSTRI DALAM MENDORONG KINERJA SEKTOR INDUSTRI NASIONAL" DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Bogor, 07 Desember 2017

Pelaksana:
Dr. M. Rizal Taufikurahman

UNIVERSITAS TRILOGI
JAKARTA
2017

Universitas Trilogi
Teknoprenuer, Kolaborasi dan Kemandirian

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama dan NIK : Dr. M. Rizal Taufikurahman (130506)

Jabatan dan Unit Kerja : Dosen Program Studi Agribisnis

Melaporkan kegiatan sebagai berikut:

1. **Nama Kegiatan** : Narasumber pada Acara Konsinyering Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian
2. **Penyelenggara** : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
3. **Tempat Pelaksanaan** : Bogor Valley Hotel Bogor
4. **Waktu Pelaksanaan** : Kamis-Jum'at, 7 Desember 2017
5. **Rangkaian Kegiatan** :

Jadwal Kegiatan
Konsinyering Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI)
Kementerian Perindustrian

No.	Pukul	Acara	Narasumber	Moderator	Peserta
Kamis, 7 Desember 2017					
1	13.00 – 13.30	Pembukaan dan Arahan	Sekretaris Ditjen PPI	Tim Praktisi dan Undangan	Semua Undangan
2	13.30 – 14.00	Pemaparan Kajian Peranan Kawasan Industri Dalam Mendukung Kinerja Sektor Industri Dan Ekonomi Regional	Dr. Rizal Taufikurahman, M.Si	Kabag. Hukum dan Kerjasama	
3	14.00 – 15.30	Pembahasan hasil kajian			
4	15.30 – 15.45	Coffee Break			
5	15.45 – 16.15	Pemaparan Kajian Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Berkelanjutan & Berwawasan Lingkungan	Kasubag. Hukum	Kasubag. Kerjasama	
6	16.15 – 17.30	Pembahasan hasil kajian			
Jumat, 8 Desember 2017					
1	09.00 – 11.00	Penyempurnaan Laporan Kajian Peranan Kawasan Industri Dalam Mendukung Kinerja Sektor Industri Dan Ekonomi Regional & Kajian Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Berkelanjutan & Berwawasan Lingkungan	Kasubag. Hukum	Internal Hukum dan Kerjasama	Praktisi & Bagian Hukum dan Kerjasama

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

6. Deskripsi Kegiatan :

- Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini berkaitan dengan adanya peraturan mengenai kewajiban Industri Besar dan Sedang (IBS) supaya masuk ke dalam kawasan Industri (KI) karena selama ini mayoritas IBS berada di luar KI, yaitu kewajiban berlokasi (PP No. 24/2009). Tidak sedikit IBS ini berada di zona industri maupun aglomerasi industry, baik di Kabupaten maupun di Kotamadya.
- Kegiatan konsinyeering diawali dengan pembukaan oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasam Ditjen PPI Kementerian Perindustrian, Dr. Heru Kustanto.
- Acara dibuka dengan sambutan dari Sekretaris Ditjen PPI, Dr. Warsito, dimana beberapa aspek penting yang perlu ditingkatkan dalam permasalahan pertumbuhan industri, perlunya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi menjadi sangat penting dalam meningkatkan pendapatan, sehingga akan memberikan impact terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan.
- Berikutnya, paparan dari narasumber dengan dimoderatori oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasam Ditjen PPI Kementerian Perindustrian, Dr. Heru Kustanto, dengan memaparkan hasil study literature dan pengolahan data berasal dari BPS, yaitu hasil survey industri nasional tahun 2005 dan 2014. Paparan tersebut dilaksanakan selama 30 menit.
- Peserta konsinyering memberikan respon dengan beberapa pertanyaan sebagai klarifikasi dan diskusi untuk melengkapi dan menyempurnakan kajian yang dilakukan para peserta. Sesi diskusi ini dilakukan selama 60 menit, beberapa pertanyaan dari peserta:

  Dr. Winardi:
  1. Bagaimana IBS yang berada di luar KI supaya bisa masuk ke dalam KI, daya tarik apa yang sebaiknya dilakukan?
  2. Kaitan dengan peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya tarik industry agar masuk ke dalam KI
  3. Permasalahan yang dihadapi dalam mengefektifkan peranan PP No. 24/2009, ternyata jumlah IBS sebelum dan setelah PP No.24/2009 tidak ada perubahan jumlah IBS yang masuk ke dalam KI.

  Dr. Warsito:
  1. Perlunya efektifitas dari KI dalam meningkatkan peranan daerah level kabupaten/Kotamadya?
  2. Prioritas untuk meningkatkan KI untuk masuk ke dalam KI agar segera dibuat norma, standar, kriteria dan prosedur.

  Arie APP:
  1. Perlu adanya sosialisasi PP No. 24/2009
  2. Peningkatan SDM yang sebaiknya ditingkatkan kuantitasnya untuk mendorong tumbuhnya industri.
  3. Kebijakan public yang sebaiknya menarik para industri agar mau masuk ke dalam kawasan industry.
- Setelah sesi disksusi selesai, jam 15.45 WIB, kemudian ditarik kesimpulan dan saran/rekomendasi

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

7. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

- Secara nasional, biaya input industri pengolahan yang berada diluar kawasan industri mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan biaya input industri pengolahan yang berada di dalam kawasan industri yang hanya mengalami sedikit kenaikan.
- Nilai output IBS lebih banyak dikontribusikan oleh industri yang berada di luar kawasan industri. Setelah adanya kewajiban berlokasi (PP 24/2009), nilai output IBS yang berlokasi di kawasan industri bertambah walaupun tidak secara signifikan .
- Secara nasional, nilai tambah IBS lebih banyak dikontribusikan oleh industri yang berada di luar kawasan industri. Sementara itu, total pekerja IBS mengalami kenaikan yang cukup banyak, terutama pada IBS yang berada di luar kawasan industri. Sebaliknya total pekerja IBS yang berada di dalam kawasan industri mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan.

Saran:

- Perlu melakukan peningkatan produktivitas industry terutama di kawasan industri baik di dalam maupun di luar kawasan. Peningkatan produktivitas tersebut, tidak hanya dari sisi efisiensi input tetapi juga efisiensi alokasi sumberdaya lainnya.
- Perlu mendorong penanaman modal luar negeri dalam menunjang produktivitas industri. Penguatan iklim investasi menjadi prasayarat dalam efisiensi alokasi input maupun output lainnya.
- Perlu melakukan efisiensi biaya utamanya biaya-biaya variabel pada industri yang berada di luar kawasan perindustrian. Selain itu, juga melakukan peningkatan dan penguatan industry, untuk meningkatkan pendapatan industry.
- Perlu sosialisasi regulasi (PP 24/2009) secara terstruktur dan menyusun panduan, norma hingga ke level kabupaten/kota.

8. Pernyataan

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Jakarta, 7 Desember 2017

Pelaksana,

Dr. M. Rizal Taufikurohman

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Lampiran 1. Surat Undangan dari Ditjen PPI

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos 3538
Telp. 5252741 Fax. 5252741

Nomor : 10 /PPI.1.2/12/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Konsinyering

Jakarta, 5 Desember 2017

Kepada Yth.
(daftar terlampir)
di-
TEMPAT

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Berkelanjutan & Berwawasan Lingkungan dan Kegiatan Kajian Peranan Kawasan Industri Dalam Mendukung Kinerja Sektor Industri Danekonomi Regional, bersama ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri konsinyering penyusunan laporan kegiatan tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis - Jumat/ 7 – 8 Desember 2017
Pukul : 13.00 - Selesai
Tempat : Bogor Valley Hotel
Jl. KH Sholeh Iskandar Blok Masjid No.5, Kota Bogor

Konfirmasi kehadiran dan Informasi lebih lanjut dapat menghubung Saudara Reza Wahyu Utama (HP. 0878 8943 7465, Telp/Fax 021-5252741).

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama,

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Heru Kustanto

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Lampiran Surat

Nomor : 10 /PPI.1.2/12/2017
Tanggal : 5 Desember 2017

Yang Terhormat :

1. Dr. Rizal Taufikurahman, M.Si (Praktisi)
2. A.R. Arie Wicaksono, SKM,ST,MM (Praktisi)
3. Agus Wahyudin, SS, M.Si (Praktisi)
4. Novri, S.Teks,MM (Praktisi)
5. Kasubdit Kawasan Industri Wilayah I
6. Kasubdit Kawasan Industri Wilayah II
7. Kasubdit Kawasan Industri Wilayah III
8. Kasubdit WPPI Wilayah I
9. Kasubdit WPPI Wilayah II
10. Kasubdit WPPI Wilayah III
11. Kabag. Hukum dan Kerjasama, Setditjen PPI;
12. Kasubag. Hukum, Setditjen PPI;
13. Kasubag. Kerjasama, Setditjen PPI;
14. Esti Pangestuti
15. Novyan Tantuah
16. Reza Wahyu Utama
17. Asep Efendi
18. Budiono
19. Agung Ashshidigy
20. Afian Arma K
21. Setyo Rizky A K

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Lampiran Surat

Nomor : 10 /PPI.1.2/12/2017
Tanggal : 5 Desember 2017

Jadwal Kegiatan

No.	Pukul	Acara	Narasumber	Moderator	Peserta
Kamis, 7 Desember 2017					
1	13.00 – 13.30	Pembukaan dan Arahan	Sekretaris Ditjen PPI	Tim Praktisi dan Undangan	Semua Undangan
2	13.30 – 14.00	Pemaparan Kajian Peranan Kawasan Industri Dalam Mendukung Kinerja Sektor Industri Dan Ekonomi Regional	Dr. Rizal Taufikurahman, M.Si	Kabag. Hukum dan Kerjasama	
3	14.00 – 15.30	Pembahasan hasil kajian			
4	15.30 – 15.45	Coffee Break			
5	15.45 – 16.15	Pemaparan Kajian Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Berkelanjutan & Berwawasan Lingkungan	Kasubag. Hukum	Kasubag. Kerjasama	
6	16.15 – 17.30	Pembahasan hasil kajian			
Jumat, 8 Desember 2017					
1	09.00 – 11.00	Penyempurnaan Laporan Kajian Peranan Kawasan Industri Dalam Mendukung Kinerja Sektor Industri Dan Ekonomi Regional & Kajian Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Berkelanjutan & Berwawasan Lingkungan	Kasubag. Hukum	Internal Hukum dan Kerjasama	Praktisi & Bagian Hukum dan Kerjasama

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Lampiran 2. Surat Tugas dari LPPM

lppm

- Ketua Prodi yang bersangkutan
- Kasubdit SDM

SURAT TUGAS
No. 268/LPPM/TUG/XII/2017

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan ini menugaskan kepada nama yang tercantum di bawah untuk menjadi **Narasumber** pada kegiatan **Konsinyering Kajian Peranan Kawasan Industri dalam Mendukung Kinerja Sektor Industri Dan Ekonomi Regional di Bogor - Jawa Barat** , yaitu:

No.	Nama	NIDN	Program Studi/Fakultas
1	Dr. M.Rizal Taufikurahman, M.Si	0321117801	Agribisnis

Yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis – Jumat, 7 - 8 Desember 2017
Pukul : 13.00 -selesai
Tempat : Bogor Valley Hotel
Jl. KH. Sholeh Iskandar Blok Masjid No.5,
Kota Bogor - Jawa Barat

Demikian surat tugas ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Penugasan ini wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan **maksimum dua minggu** setelah pelaksanaan.

Jakarta, 03 Desember 2017

lppm

Dr. P. Setia Lenggono
Kepala LPPM Univ.Trilogi

Tembusan Yth ,
- Wakil Rektor
- Ketua Prodi yang bersangkutan
- Kasubdit SDM

LPPM UNIVERSITAS TRILOGI
Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Trilogi
Jl. Kampus Trilogi d.h STEKPI No.1 Kalibata - Jakarta 12760
Telp. 021 798 0011 ext. 429 Fax. 021 798 1352
Website: www.universitas-trilogi.ac.id Email: lppm@universitas-trilogi.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

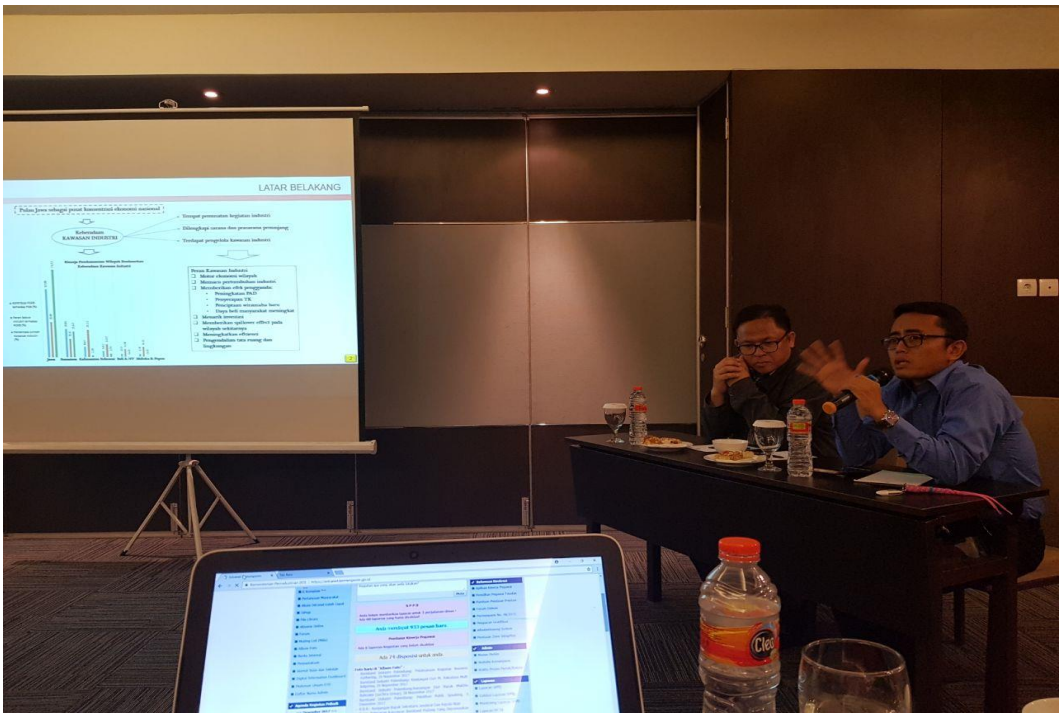

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Lampiran 4. Materi Paparan

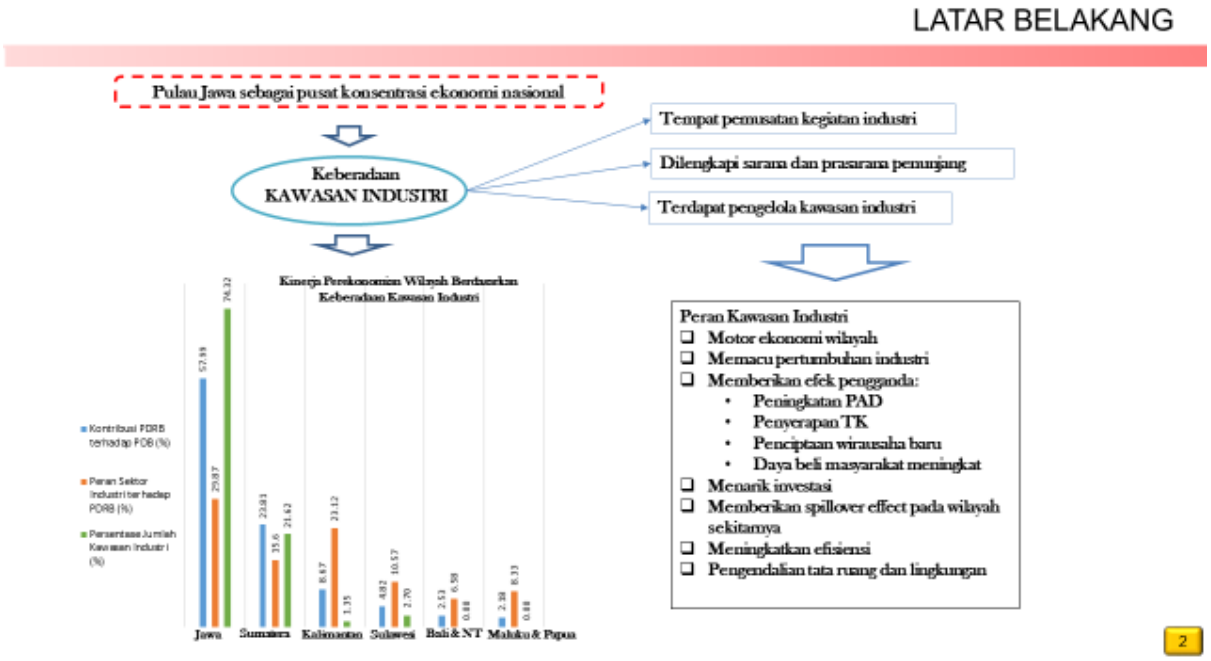

TUJUAN

Melakukan analisis peran kawasan industri terhadap kinerja sektor industri Tahun 2005 dan Tahun 2014

Melakukan analisis perbandingan kinerja sektor industri berdasarkan lokasi (di dalam dan di luar kawasan industri)

3

METODOLOGI

4

METODE PENGOLAHAN DATA

- **Sumber Data**: SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN yang dilakukan oleh BPS, pada tahun 2005 dan 2014.
- **Tujuan** : Pengambilan tahun 2005 dan 2014 untuk membandingkan setelah adanya kebijakan wajib berlokasi untuk perusahaan industri baru di Kawasan Industri sesuai dengan PP 24/2009 tentang Kawasan Industri.
- **Teknik Agregrasi**: ada butir pertanyaan dari kuesioner mengenai lokasi perusahaan industri, yaitu Di dalam Kawasan Industri atau Di Luar Kawasan Industri. Selanjutnya setiap variabel dijumlahkan dan dibuat persentase yang berada di Dalam Kawasan Industri dan Di Luar Kawasan Industri.

5

KUESIONER SURVEY TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN

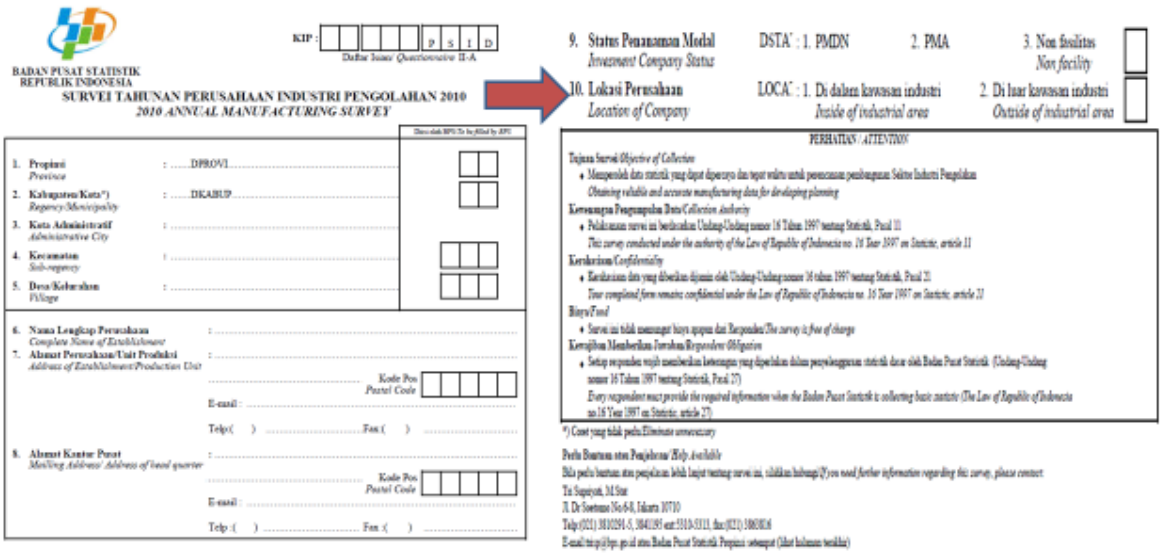
BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA

KIP : P S I D
Daftar Isian/ Questionnaire II-A

SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN 2010
2010 ANNUAL MANUFACTURING SURVEY

Diisi oleh BPS/ To be filled by BPS

1. Propinsi / *Province* : ....DPROVI....
2. Kabupaten/Kota*) / *Regency/Municipality* : ....DKABUP....
3. Kota Administratif / *Administrative City* : ....
4. Kecamatan / *Sub-regency* : ....
5. Desa/Kelurahan / *Village* : ....
6. Nama Lengkap Perusahaan / *Complete Name of Establishment* : ....
7. Alamat Perusahaan/Unit Produksi / *Address of Establishment/Production Unit* : ....
   Kode Pos / *Postal Code*
   E-mail : ....
   Telp.( ) .... Fax.( ) ....
8. Alamat Kantor Pusat / *Mailing Address/ Address of head quarter* : ....
   Kode Pos / *Postal Code*
   E-mail : ....
   Telp.( ) .... Fax.( ) ....

9. Status Penanaman Modal / *Investment Company Status* — DSTA : 1. PMDN 2. PMA 3. Non fasilitas / *Non facility*
10. Lokasi Perusahaan / *Location of Company* — LOCA : 1. Di dalam kawasan industri / *Inside of industrial area* 2. Di luar kawasan industri / *Outside of industrial area*

PERHATIAN / *ATTENTION*

Tujuan Survei/*Objective of Collection*
- Mengumpulkan data statistik yang dapat diperoleh dan tepat waktu untuk perencanaan pembangunan Sektor Industri Pengolahan
  Obtaining reliable and accurate manufacturing data for developing planning

Kewenangan Pengumpulan Data/*Collection Authority*
- Pelaksanaan survei ini berlandasan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 11
  This survey conducted under the authority of the Law of Republic of Indonesia no. 16 Year 1997 on Statistic, article 11

Kerahasiaan/*Confidentiality*
- Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21
  Your completed form remains confidential under the Law of Republic of Indonesia no. 16 Year 1997 on Statistic, article 21

Biaya/*Fund*
- Survei ini tidak memungut biaya apapun dari Responden/*The survey is free of charge*

Kewajiban Memberikan Jawaban/*Responders' Obligation*
- Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 27)
  Every respondent must provide the required information when the Badan Pusat Statistik is collecting basic statistic (The Law of Republic of Indonesia no 16 Year 1997 on Statistic, article 27)

*) Coret yang tidak perlu/*Eliminate unnecessary*

Perlu Bantuan atau Penjelasan/*Help Available*
Bila perlu bantuan atau penjelasan lebih lanjut tentang survei ini, silahkan hubungi/*If you need further information regarding this survey, please contact*
Tu Sugiyati, M.Stat
Jl. Dr Soetomo No 6-8, Jakarta 10710
Telp (021) 3810291-5, 3841181 ext 5310-5313, fax (021) 3800184
E-mail: tugi@bps.go.id atau Badan Pusat Statistik Propinsi setempat (Lihat halaman terakhir)

6

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KUESIONER SURVEY TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN

BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA

KIP : P S I D
Daftar Isian/ Questionnaire II-A

SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN 2010
2010 ANNUAL MANUFACTURING SURVEY

Diisi oleh BPS/ To be filled by BPS

1. Propinsi / *Province* : .....DPROVI.....
2. Kabupaten/Kota*) / *Regency/Municipality* : .....DKABUP.....
3. Kota Administratif / *Administrative City* : .....
4. Kecamatan / *Sub-regency* : .....
5. Desa/Kelurahan / *Village* : .....

6. Nama Lengkap Perusahaan / *Complete Name of Establishment* : .....
7. Alamat Perusahaan/Unit Produksi / *Address of Establishment/Production Unit* : .....
Kode Pos / *Postal Code*
E-mail : .....
Telp.( ) ..... Fax.( ) .....
8. Alamat Kantor Pusat / *Mailing Address/ Address of head quarter* : .....
Kode Pos / *Postal Code*
E-mail : .....
Telp.( ) ..... Fax.( ) .....

9. Status Penanaman Modal / *Investment Company Status* — DSTA* : 1. PMDN 2. PMA 3. Non fasilitas / *Non facility*
10. Lokasi Perusahaan / *Location of Company* — LOCA* : 1. Di dalam kawasan industri / *Inside of industrial area* 2. Di luar kawasan industri / *Outside of industrial area*

PERHATIAN / *ATTENTION*

Tujuan Survei/*Objective of Collection*
- Memperoleh data statistik yang dapat diperoleh dan tepat waktu untuk perencanaan pembangunan Sektor Industri Pengolahan
Obtaining reliable and accurate manufacturing data for developing planning

Kewenangan Pengumpulan Data/*Collection Authority*
- Pelaksanaan survei ini berlandasan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 11
This survey conducted under the authority of the Law of Republic of Indonesia no. 16 Year 1997 on Statistic, article 11

Kerahasiaan/*Confidentiality*
- Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21
Your completed form remains confidential under the Law of Republic of Indonesia no. 16 Year 1997 on Statistic, article 21

Biaya/*Fee*
- Survei ini tidak memungut biaya apapun dari Responden/*The survey is free of charge*

Kewajiban Memberikan Jawaban/*Respondent Obligation*
- Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 17)
Every respondent must provide the required information when the Badan Pusat Statistik is collecting basic statistic (The Law of Republic of Indonesia no 16 Year 1997 on Statistic, article 17)

*) Coret yang tidak perlu/*Eliminate unnecessary*

Pelu Bantuan atau Penjelasan/*Help Available*
Bila perlu bantuan atau penjelasan lebih lanjut tentang survei ini, silahkan hubungi/*If you need further information regarding this survey, please contact*
Tu Sugiyati, M.Stat
Jl. Dr Soetomo No 6-8, Jakarta 10710
Telp (021) 3810291-5, 3840385 ext 5310-5311, fax (021) 3860816
E-mail: tugi@bps.go.id atau Badan Pusat Statistik Propinsi setempat (Jika bahasan tersedia)

6

KUESIONER SURVEY TAHUNAN PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN

BAGIAN/*PART* V. MODAL TETAP/*FIXED CAPITAL*

18. Nilai taksiran seluruh barang modal tetap dan penambahan/pengurangan/perbaikan besar barang modal tetap dan penyusutan selama tahun 2010
Estimated value of fixed capital and addition/reduction/ major repairs and depreciation during 2010

Jenis barang modal / *Kind of capital*	Pembelian/ penambahan dan pembuatan/ perbaikan besar / *Purchase/addition and construction/ major repair* (Rp)	Penjualan/ pengurangan barang modal / *Sale/reduction of fixed capital* (Rp)	Penyusutan barang modal / *Depreciation of fixed capital* (Rp)	Nilai taksiran seluruh barang modal tetap menurut harga berlaku per 31 Desember 2010 / *Estimated value of all fixed capital based on current value per 31 December 2010* (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Tanah/*Land*	CLTTCU .000	CLSACU .000	CLDACU .000	V1101 .000
b. Gedung/*Building*	CBTTCU .000	CBSACU .000	CBDACU .000	V1103 .000
c. Mesin dan perlengkapan / *Machinery and Equipment*	CMTTCU .000	CMSACU .000	CMDACU .000	V1106 .000
d. Kendaraan/*Vehicles*	CVTTCU .000	CVSACU .000	CVDACU .000	V1109 .000
e. Lainnya/*Others*	COTTCU .000	COSACU .000	CODACU .000	V1112 .000
Jumlah/*Total*	CTTTCU .000	CTSACU .000	CTDACU .000	V1115 .000

BAGIAN/*PART* VI. PERNYATAAN/*CERTIFICATION*

19. Data yang tercantum dalam daftar isian ini diisi dengan sebenarnya dan menurut keadaan yang sesungguhnya
Data stated in this form has been filled out truthfully and accurately by

1. Nama/*Name* : .....
2. Jabatan/*Occupation* : .....
3. Telepon/*Telephone* : ..... 4. Fax/*Fax* : .....
5. E-mail/*E-mail* : .....
6. Tanda Tangan & Cap Perusahaan / *Signature and company seal* : ..... 7. Tanggal / *Date* : ..... (2011)

20. Bagian ini kosong diisi oleh petugas BPS
For BPS enumerator's use only

1. Nama : .....
2. Jabatan*) : KSK/ Staf BPS Kab/Kota/BPS Propinsi Lainnya (Tulislah) : .....
3. Tanda Tangan : .....

*) Lingkari yang sesuai dengan jabatan

7

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

8

JUMLAH INDUSTRI BESAR SEDANG

	JUMLAH IBS		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	1.722	1.697	8,31	6,94
LUAR KI	19.007	22.772	91,69	93,06
Jumlah	20.729	24.469	100,00	100,00

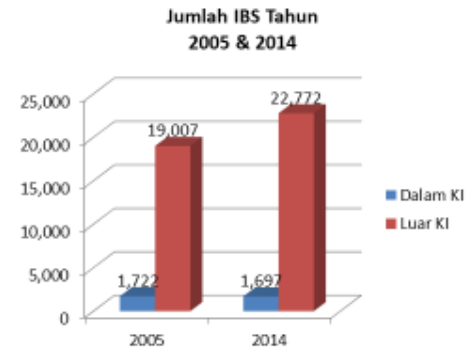

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

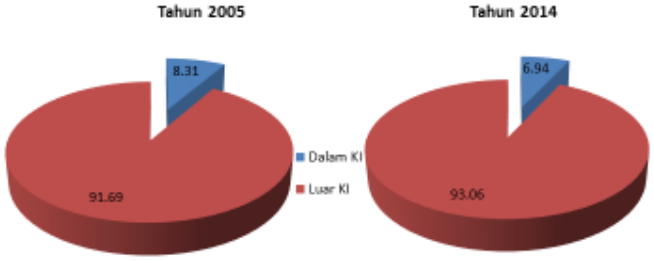

Keterangan :
Secara nasional, IBS lebih banyak berlokasi di luar kawasan industri. Setelah adanya kewajiban berlokasi (PP 24/2009), jumlah IBS yang berlokasi di kawasan industri tidak bertambah secara signifikan karena kemungkinan 3 hal :

1. Jumlah IBS yang masuk ke KI,lebih kecil dibandingkan dengan IBS yang masuk di luar KI.
2. IBS yang sudah berlokasi di dalam KI berhenti beroperasi dengan berbagai sebab.
3. Jumlah kawasan industri yang lahannya masih tersedia sudah terbatas, sehingga diperlukan upaya untuk menambah jumlah kawasan industri, yang diprioritaskan di luar Jawa.

9

JUMLAH IBS PERMODALAN PUSAT

	JUMLAH IBS PERMODALAN PUSAT		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	28	29	8,78%	9,15%
LUAR KI	291	288	91,22%	90,85%
Jumlah	319	317	100,00%	100,00%

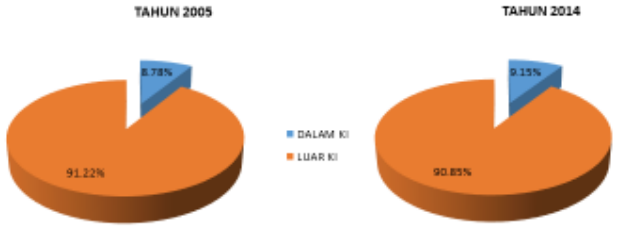

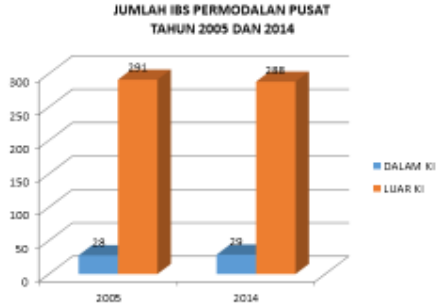

Keterangan :
Secara nasional, jumlah Industri Besar Sedang yang mendapatkan modal dari pusat mengalami penurunan, namun dukungan modal dari pusat pada IBS dalam kawasan industri mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

10

JUMLAH IBS PERMODALAN DAERAH

	JUMLAH IBS PERMODALAN DAERAH		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	12	5	2,23%	2,53%
LUAR KI	525	193	97,77%	97,47%
Jumlah	537	198	100,00%	100,00%

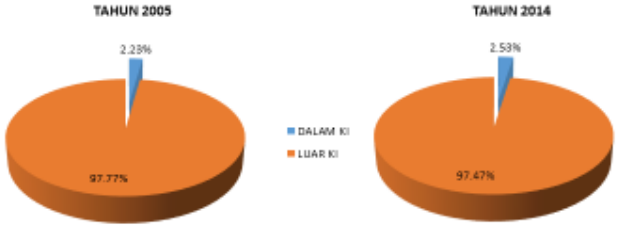

Keterangan :
Secara nasional, jumlah Industri Besar Sedang yang mendapatkan permodalan daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini bisa dikarenakan oleh berkurang atau berhentinya operasional dari IBS tersebut.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

11

JUMLAH IBS PERMODALAN SWASTA NASIONAL

	JUMLAH IBS PERMODALAN SWASTA NASIONAL		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	1.413	1.325	7,40%	5,86%
LUAR KI	17.690	21.288	92,60%	94,14%
Jumlah	19.103	22.613	100,00%	100,00%

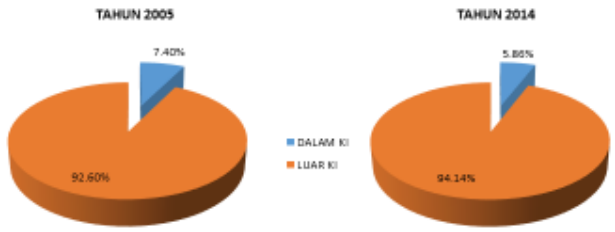

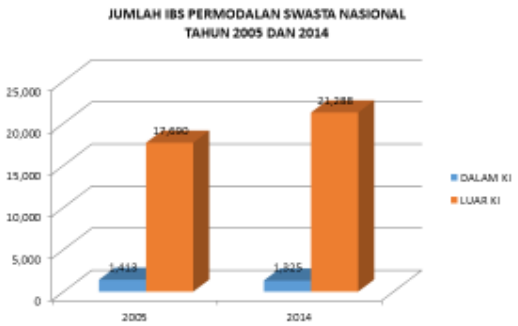

Keterangan :
Secara nasional, Industri Besar Sedang yang mendapatkan permodalan swasta nasional mengalami peningkatan, namun jumlah IBS dengan permodalan swasta nasional yang berada dalam kawasan industri mengalami penurunan.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

12

JUMLAH IBS PERMODALAN SWASTA ASING

	JUMLAH IBS PERMODALAN ASING		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	423	513	24,96%	20,95%
LUAR KI	1.272	1.936	75,04%	79,05%
Jumlah	1.695	2.449	100,00%	100,00%

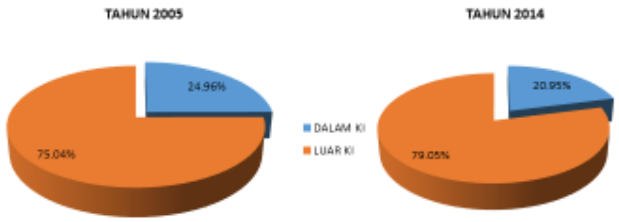

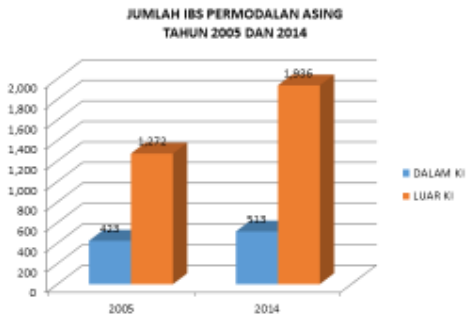

Keterangan :
Secara nasional, jumlah Industri Besar Sedang dengan permodalan swasta asing yang berada dalam kawasan industri mengalami peningkatan. Adanya PP 24/2009 mampu menaikkan minat pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

13

JUMLAH TOTAL PEKERJA IBS (PRODUKSI)

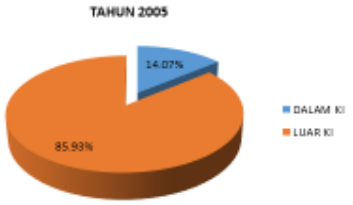

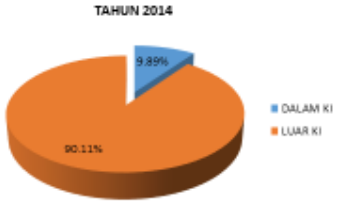

	JUMLAH TOTAL PEKERJA PRODUKSI IBS		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	497.637	431.008	14,07%	9,89%
LUAR KI	3.039.591	3.926.696	85,93%	90,11%
Jumlah	3.537.228	4.357.704	100,00%	100,00%

Keterangan :
Secara nasional, jumlah total pekerja produksi IBS mengalami kenaikan, namun total pekerja produksi IBS dalam kawasan industri mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh berhentinya operasional IBS tersebut, atau adanya penerapan teknologi baru.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

14

JUMLAH TOTAL PEKERJA IBS (LAINNYA)

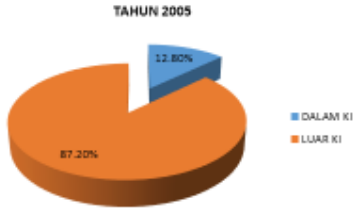

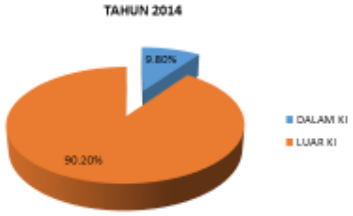

	JUMLAH TOTAL PEKERJA LAINNYA IBS		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	88.238	79.105	12,80%	9,80%
LUAR KI	601.106	728.020	87,20%	90,20%
Jumlah	689.344	807.125	100,00%	100,00%

Keterangan :
Secara nasional, Total pekerja lainnya dalam Industri Besar Sedang mengalami peningkatan, terutama industri yang berada di luar kawasan industri. Namun sebaliknya total pekerja lainnya Industri Besar Sedang dalam kawasan industri mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh berhentinya operasional IBS tersebut, atau adanya penerapan teknologi baru.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

15

JUMLAH TOTAL PENGELUARAN IBS UNTUK KARYAWAN PRODUKSI

	JUMLAH TOTAL PENGELUARAN IBS UNTUK KARYAWAN PRODUKSI (Rp)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	7.403.593.610	17.746.124.958	18,00%	14,41%
LUAR KI	33.721.640.838	105.419.757.886	82,00%	85,59%
Jumlah	41.125.234.448	123.165.882.844	100,00%	100,00%

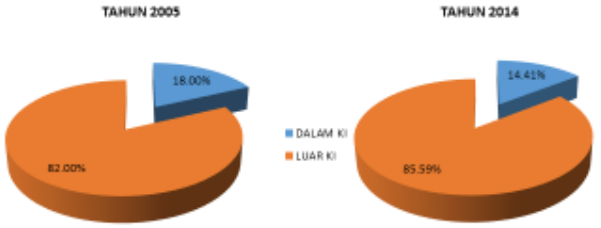

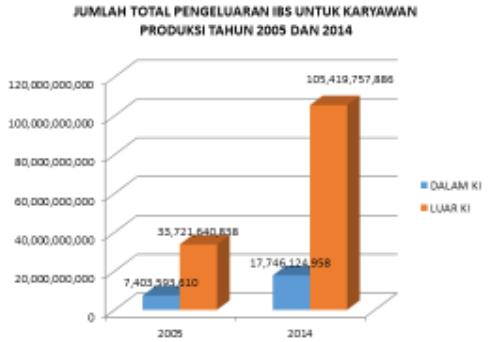

Keterangan :
Secara nasional, total pengeluaran IBS untuk karyawan produksi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pengeluaran IBS dalam kawasan industri untuk karyawan produksi juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

16

JUMLAH TOTAL PENGELUARAN IBS UNTUK KARYAWAN LAINNYA

	JUMLAH TOTAL PENGELUARAN IBS UNTUK KARYAWAN LAINNYA (Rp)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	3.201.644.872	4.851.017.774	18,84%	13,84%
LUAR KI	13.794.423.738	30.195.453.764	81,16%	86,16%
Jumlah	16.996.068.610	35.046.471.538	100,00%	100,00%

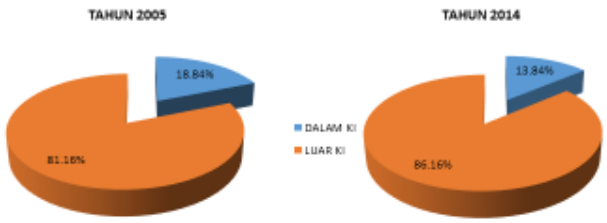

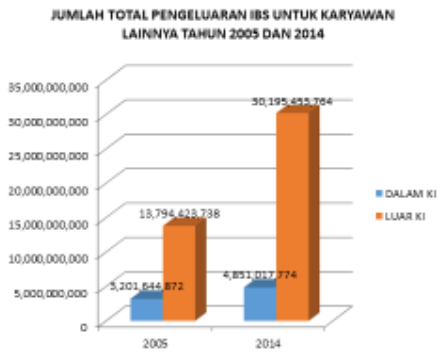

Keterangan :
Secara nasional, pengeluaran Industri Besar Sedang untuk karyawan lain mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

17

JUMLAH KUANTITAS PENGGUNAAN BAHAN BAKAR IBS (BENSIN)

	JUMLAH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR BENSIN IBS (Ltr)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	24.981.351	334.000.071	3,02%	33,48%
LUAR KI	801.645.441	663.701.273	96,98%	66,52%
Jumlah	826.626.792	997.701.344	100,00%	100,00%

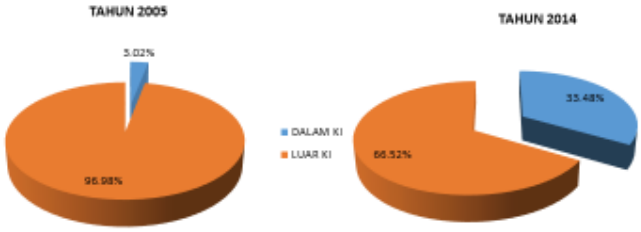

Keterangan :
Secara nasional, penggunaan bahan bakar bensin dalam IBS mengalami peningkatan, terutama IBS yang berada dalam kawasan indsutri. Sebaliknya penggunaan bahan bakar bensin pada IBS di luar kawasan industri mengalami penurunan.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

18

NILAI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR IBS (BENSIN)

	NILAI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR BENSIN IBS (Rp)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	72.628.372	304.132.090	3,68%	5,41%
LUAR KI	1.898.671.925	5.321.261.592	96,32%	94,59%
Jumlah	1.971.300.297	5.625.393.682	100,00%	100,00%

Keterangan :
Secara nasional, nilai penggunaan bahan bakar bensin pada IBS mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama pada IBS yang berada diluar kawasan industri.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

19

JUMLAH KUANTITAS PENGGUNAAN BAHAN BAKAR IBS (SOLAR)

	JUMLAH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR SOLAR IBS (Ltr)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	362.765.311	315.060.182	4,38%	7,25%
LUAR KI	7.916.063.656	4.029.583.829	95,62%	92,75%
Jumlah	8.278.828.967	4.344.644.011	100,00%	100,00%

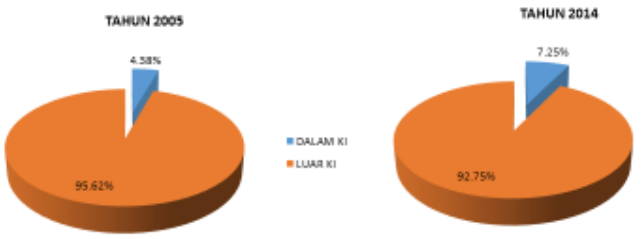

Keterangan :
Secara nasional, penggunaan bahan bakar solar pada IBS mengalami penurunan yang sangat signifkan.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

20

NILAI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR IBS (SOLAR)

	NILAI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR SOLAR IBS (Rp)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	978.914.882	2.286.233.720	7,74%	6,28%
LUAR KI	11.674.335.258	34.126.084.885	92,26%	93,72%
Jumlah	12.653.250.140	36.412.318.605	100,00%	100,00%

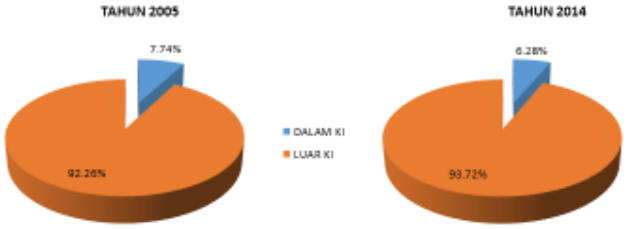

Keterangan :
Secara nasional, nilai penggunaan bahan bakar solar pada IBS mengalami peningkatan.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

21

JUMLAH KUANTITAS PENGGUNAAN BAHAN BAKAR IBS (MIYAK TANAH)

	JUMLAH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH IBS (Ltr)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	8.236.180	1.715.340	5,28%	1,04%
LUAR KI	147.684.702	162.905.863	94,72%	98,96%
Jumlah	155.920.882	164.621.203	100,00%	100,00%

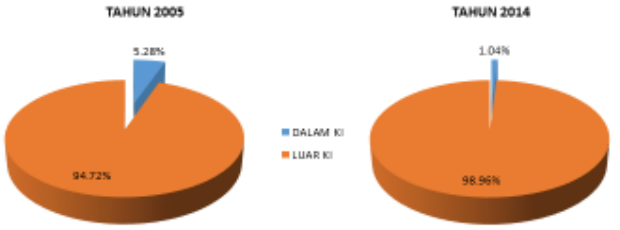

Keterangan :
Secara nasional, kuantitas penggunaan bahan bakar minyak tanah pada IBS mengalami peningkatan, namun penggunaan minyak tanah pada IBS dalam kawasan indstri mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

22

NILAI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR IBS (MINYAK TANAH)

	NILAI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH IBS (Rp)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	15.002.911	13.663.841	5,50%	1,04%
LUAR KI	257.686.171	1.294.830.495	94,50%	98,96%
Jumlah	272.689.082	1.308.494.336	100,00%	100,00%

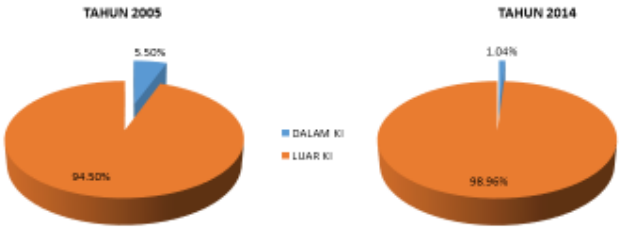

Keterangan :
Secara nasional, nilai penggunaan bahan bakar minyak tanah pada IBS mengalami peningkatan. Pada IBS yang berada dalam kawasan industri mengalami pengurangan dalam nilai penggunaan minyak tanah.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

23

NILAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG IBS BERASAL DARI IMPOR

	NILAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG IBS IMPOR (Rp)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	28.207.463.931	53.207.292.734	16,55%	14,85%
LUAR KI	142.242.464.144	305.061.908.094	83,45%	85,15%
Jumlah	170.449.928.075	358.269.200.828	100,00%	100,00%

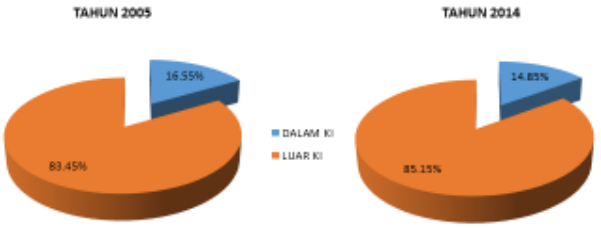

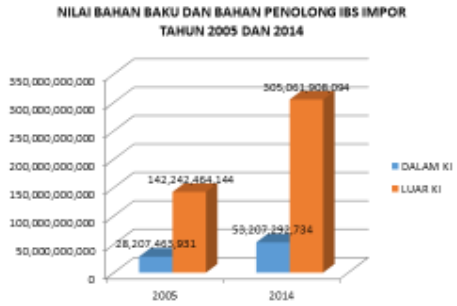

Keterangan :
Secara nasional, Nilai bahan baku dan bahan penolong IBS yang berasal dari produksi luar negeri mengalami peningkatan yang signifikan baik IBS yang berada di dalam kawasan industri maupun IBS yang berada di luar kawasan industri.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

24

TOTAL NILAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG IBS

	TOTAL NILAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG IBS (Rp)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	83.258.913.141	216.466.641.169	14,33%	13,57%
LUAR KI	497.799.041.343	1.378.987.056.989	85,67%	86,43%
Jumlah	581.057.954.484	1.595.453.698.158	100,00%	100,00%

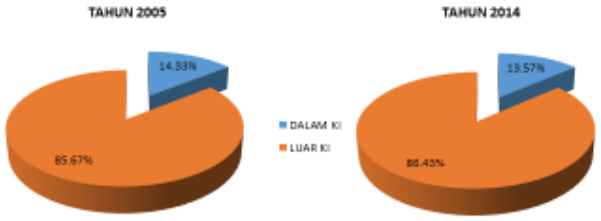

Keterangan :
Secara nasional, total nilai bahan baku dan bahan penolong IBS mengalami peningkatan yang signifikan, terutama untuk IBS yang berada di luar kawasan industri. Peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi pada IBS yang berada di dalam kawasan industri.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

25

JUMLAH IBS YANG MELAKUKAN EKSPOR

	JUMLAH IBS YANG MELAKUKAN EKSPOR		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	617	553	20,54%	25,17%
LUAR KI	2.387	1.644	79,46%	74,83%
Jumlah	3.004	2.197	100,00%	100,00%

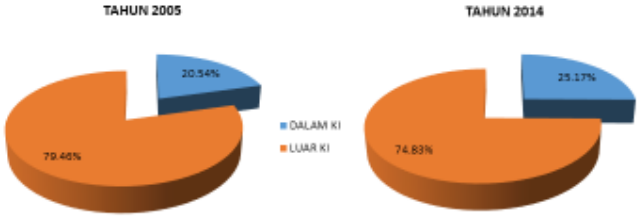

Keterangan :
Secara nasional, jumlah IBS yang melakukan ekspor mengalami penurunan yang cukup tinggi, baik itu IBS yang berada di dalam kawasan industri maupun yang berada di luar kawasan industri.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

26

JUMLAH IBS YANG MELAKUKAN RE-EKSPOR KE PEMASOK BAHAN BAKU

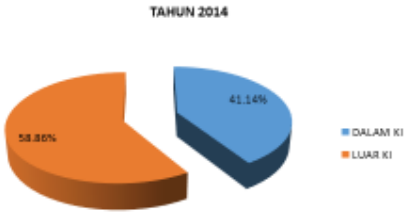

	JUMLAH IBS YANG MELAKUKAN RE-EKSPOR KE PEMASOK BAHAN BAKU		PERSENTASE		JUMLAH IBS	RATA-RATA
	2005	2014	2005	2014	2014	2014
DALAM KI	0	123	0,00%	41,14%	1.697	0,07
LUAR KI	0	176	0,00%	58,86%	22.772	0,01
Jumlah	0	299	0,00%	100,00%	24.469	0,01

Keterangan :
Secara nasional, jumlah IBS yang melakukan re-ekspor kembali ke pemasok bahan baku lebih banyak terjadi pada IBS yang berada di luar kawasan industri, namun berdasarkan perbandingannya dengan eksisting industri, IBS yang berada di dalam kawasan industri lebih banyak melakukan re-ekspor ke pemasok bahan baku.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

27

NILAI TOTAL BARANG YANG DIHASILKAN

	NILAI TOTAL BARANG YANG DIHASILKAN IBS (Rp)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	151.048.230.044	463.540.089.422	15,03%	14,36%
LUAR KI	854.007.935.504	2.763.385.988.430	84,97%	85,64%
Jumlah	1.005.056.165.548	3.226.926.077.852	100,00%	100,00%

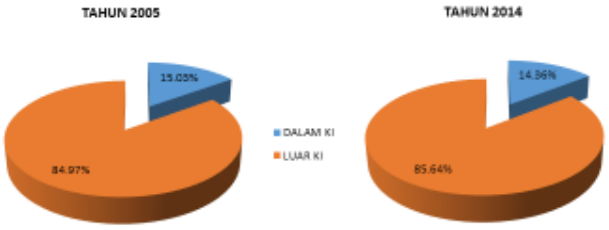

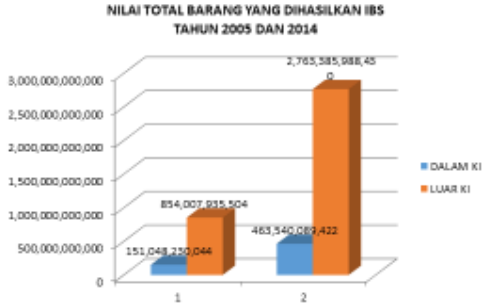

Keterangan :
Secara nasional, nilai total barang yang dihasilkan oleh IBS mengalami kenaikan yang signifikan, terutama IBS yang berada di luar kawasan industri. Namun, IBS yang berada di dalam kawasan industri juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

28

PERSENTASE YANG DIEKSPOR IBS

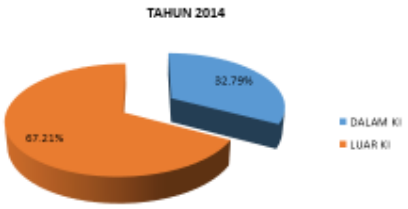

	PERSENTASE YANG DIEKSPOR IBS		PERSENTASE		JUMLAH IBS	RATA-RATA
	2005	2014	2005	2014	2014	2014
DALAM KI	0	65	0,00%	32,79%	1.697	0,04
LUAR KI	0	133	0,00%	67,21%	22.772	0,01
Jumlah	0	197	0,00%	100,00%	24.469	0,01

Keterangan :
Secara nasional, rata-rata persentase hasil yang di ekspor oleh IBS banyak dikontribusi oleh IBS yang berada di dalam kawasan industri.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

29

PERSENTASE REALISASI PRODUKSI IBS

	PERSENTASE REALISASI PRODUKSI IBS		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	113	81	49,20%	35,56%
LUAR KI	117	146	50,80%	64,44%
Jumlah	230	227	100,00%	100,00%

Keterangan :
Secara nasional, persentase realisasi produksi IBS mengalami penurunan terutama pada IBS yang berada di dalam kawasan industri.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

30

PENDAPATAN DARI JASA INDUSTRI DALAM NEGERI IBS

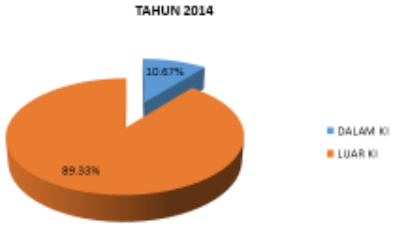

	PENDAPATAN DARI JASA INDUSTRI DALAM NEGERI IBS (Rp)		PERSENTASE		JUMLAH IBS	RATA-RATA
	2005	2014	2005	2014	2014	2014
DALAM KI	0	19.487.685.299	0,00%	10,67%	1.697	11483609
LUAR KI	0	163.224.680.057	0,00%	89,33%	22.772	7167780
Jumlah	0	182.712.365.356	0,00%	100,00%	24.469	7467095,73

Keterangan :
Secara nasional, pendapatan dari jasa industri dalam negeri IBS banyak dikontribusi oleh IBS yang berada di luar kawasan industri. Namun rata-rata pendapatan dari jasa industri dalam negerei Per-IBS lebih banyak dikontribusi oleh IBS yang berada di dalam kawasan industri.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

31

PENDAPATAN DARI JASA INDUSTRI LUAR NEGERI IBS

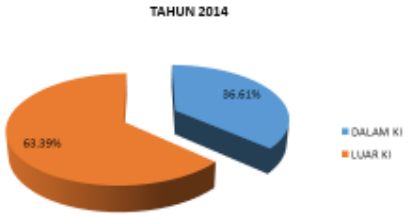

	PENDAPATAN DARI JASA INDUSTRI LUAR NEGERI IBS (Rp)		PERSENTASE		JUMLAH IBS	RATA-RATA
	2005	2014	2005	2014	2014	2014
DALAM KI	0	7.811.809.347	0,00%	36,61%	1.697	4603305,45
LUAR KI	0	13.526.458.365	0,00%	63,39%	22.772	593995,19
Jumlah	0	21.338.267.712	0,00%	100,00%	24.469	872053,12

Keterangan :
Secara nasional, pendapatan dari jasa industri luar negeri IBS banyak dikontribusi oleh IBS yang berada di luar kawasan industri, namun secara rata-rata, IBS yang berada di dalam kawasan industri lebih banyak berkontribusi dibndingka dengan IBS yang berada di luar kawasan industri.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

32

TOTAL PENDAPATAN IBS DARI JASA INDUSTRI

	TOTAL PENDAPATAN IBS DARI JASA INDUSTRI (Rp)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	9.090.376.973	27.299.494.646	15,47%	13,38%
LUAR KI	49.658.526.287	176.751.138.422	84,53%	86,62%
Jumlah	58.748.903.260	204.050.633.068	100,00%	100,00%

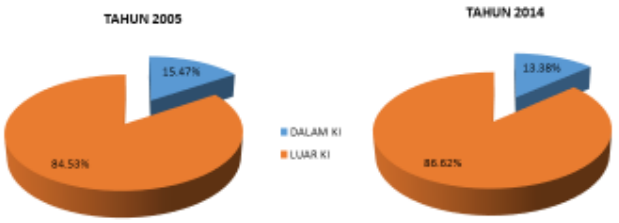

Keterangan :
Secara nasional, total pendapatan IBS dari jasa industri mengalami peningkatan yang sangat signifikan. IBS yang berada di luar kawasan industri mampu memberikan kontribusi yang banyak, namun IBS yang berada di dalam kawasan industri juga memberikan kontribusi yang cukup banyak.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

33

JUMLAH PENDAPATAN LAIN IBS

	JUMLAH PENDAPATAN LAIN IBS (Rp)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	1.502.071.380	7.533.793.122	13,18%	6,95%
LUAR KI	9.890.936.514	100.888.607.384	86,82%	93,05%
Jumlah	11.393.007.894	108.422.400.506	100,00%	100,00%

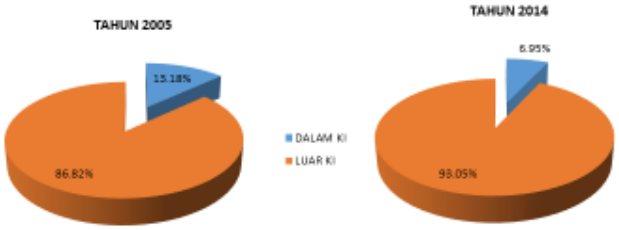

Keterangan :
Secara nasional, jumlah pendapatan lain IBS baik yang berada di dalam kawasan industri maupun di luar kawasan industri mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

34

JUMLAH TOTAL PENDAPATAN LAINNYA IBS

	JUMLAH TOTAL PENDAPATAN LAINNYA IBS (Rp)		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	10.592.448.353	34.833.287.768	15,10%	11,15%
LUAR KI	59.549.462.801	277.639.745.806	84,90%	88,85%
Jumlah	70.141.911.154	312.473.033.574	100,00%	100,00%

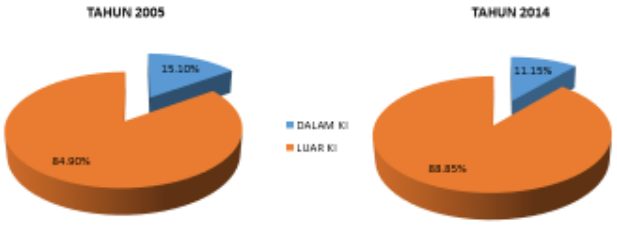

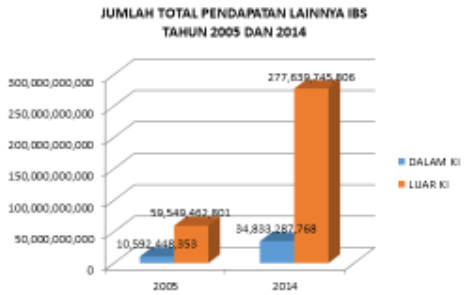

Keterangan :
Secara nasional, total pendapatan lainnya IBS mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terutama IBS yang berada di luar kawaasan industri. Namun kenaikan yang dialami IBS yang berada di dalam kawasan industri juga sangat berkontribusi.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

35

BIAYA INPUT IBS

	BIAYA INPUT IBS		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	94.515.469.658	240.700.102.158	13,65%	12,44%
LUAR KI	597.728.928.581	1.693.453.191.555	86,35%	87,56%
Jumlah	692.244.398.239	1.934.153.293.713	100,00%	100,00%

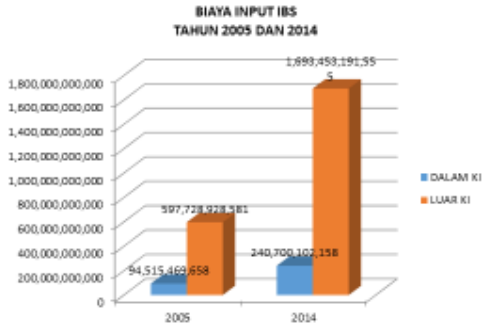

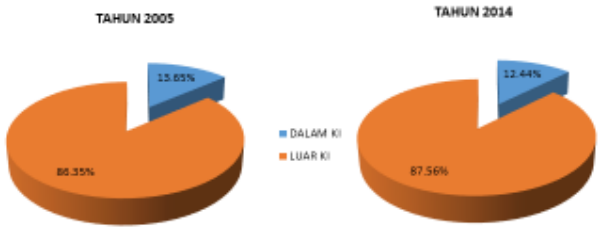

Keterangan :
Secara nasional, biaya input IBS yang berada diluar kawasan industri mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan biaya input IBS yang berada di dalam kawasan industri yang hanya mengalami sedikit kenaikan.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

36

NILAI OUTPUT INDUSTRI BESAR SEDANG

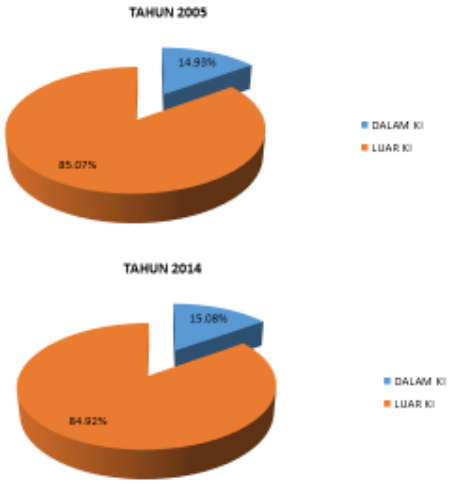

	Nilai Rp Juta		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	162.489.153	546.319.611	14,93%	15,08%
LUAR KI	926.193.232	3.077.289.368	85,07%	84,92%
Jumlah	1.088.682.386	3.623.608.979	100,00%	100,00%

Keterangan :
Secara nasional, nilai output IBS lebih banyak dikontribusikan oleh industri yang berada di luar kawasan industri. Setelah adanya kewajiban berlokasi (PP 24/2009), nilai output IBS yang berlokasi di kawasan industri bertambah walaupun tidak secara signifikan karena kemungkinan 2 hal :

1. Jumlah IBS yang masuk ke KI,lebih kecil dibandingkan dengan IBS yang masuk di luar KI.
2. IBS yang sudah berlokasi di dalam KI lebih banyak menghasilkan produk-produk industri dengan nilai yang tinggi

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

37

NILAI TAMBAH INDUSTRI BESAR SEDANG

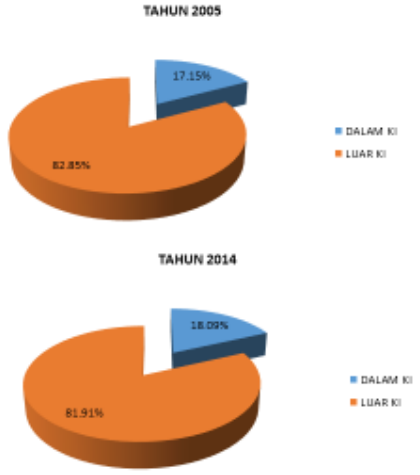

	Nilai Rp Juta		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	67.973.683	305.619.508	17,15%	18,09%
LUAR KI	328.464.304	1.383.836.176	82,85%	81,91%
Jumlah	396.437.988	1.689.455.685	100,00%	100,00%

Keterangan :
Secara nasional, nilai tambah IBS lebih banyak dikontribusikan oleh industri yang berada di luar kawasan industri. Setelah adanya kewajiban berlokasi (PP 24/2009), nilai tambah IBS yang berlokasi di kawasan industri meningkat karena IBS yang sudah berlokasi di dalam KI lebih banyak menghasilkan produk-produk industri dengan nilai yang tambah tinggi

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

38

TOTAL PEKERJA IBS

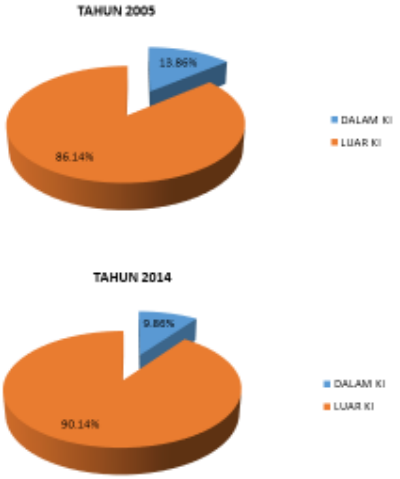

	TOTAL PEKERJA IBS		PERSENTASE	
	2005	2014	2005	2014
DALAM KI	585.875	510.652	13,86%	9,86%
LUAR KI	3.640.697	4.669.879	86,14%	90,14%
Jumlah	4.226.572	5.180.531	100,00%	100,00%

Keterangan :
Secara nasional, total pekerja IBS mengalami kenaikan yang cukup banyak, terutama pada IBS yang berada di luar kawasan industri. Sebaliknya total pekerja IBS yang berada di dalam kawasan industri mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan.

Sumber : BPS, Diolah DJ PPI (2017)

39

KESIMPULAN

Secara nasional, biaya input industri pengolahan yang berada diluar kawasan industri mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan biaya input industri pengolahan yang berada di dalam kawasan industri yang hanya mengalami sedikit kenaikan.

Nilai output IBS lebih banyak dikontribusikan oleh industri yang berada di luar kawasan industri. Setelah adanya kewajiban berlokasi (PP 24/2009), nilai output IBS yang berlokasi di kawasan industri bertambah walaupun tidak secara signifikan .

Secara nasional, nilai tambah IBS lebih banyak dikontribusikan oleh industri yang berada di luar kawasan industri. Sementara itu, total pekerja IBS mengalami kenaikan yang cukup banyak, terutama pada IBS yang berada di luar kawasan industri. Sebaliknya total pekerja IBS yang berada di dalam kawasan industri mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan.

40

REKOMENDASI

Perlu melakukan peningkatan produktivitas industry terutama di kawasan industri baik di dalam maupun di luar kawasan. Peningkatan produktivitas tersebut, tidak hanya dari sisi efisiensi input tetapi juga efisiensi alokasi sumberdaya lainnya.

Perlu mendorong penanaman modal luar negeri dalam menunjang produktivitas industri. Penguatan iklim investasi menjadi prasayarat dalam efisiensi alokasi input maupun output lainnya.

Perlu melakukan efisiensi biaya utamanya biaya-biaya variabel pada industri yang berada di luar kawasan perindustrian. Selain itu, juga melakukan peningkatan dan penguatan industry, untuk meningkatkan pendapatan industry.

41

TERIMA KASIH

42